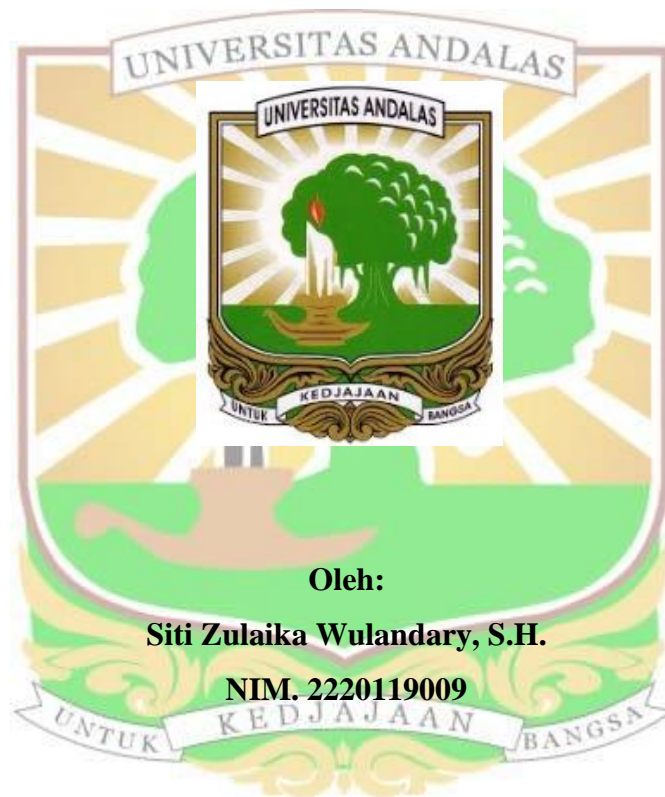


**PERTANGGUNGJAWABAN TIM PENJAMIN MUTU DALAM
PENETAPAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI PADA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Hukum**



Oleh:

Siti Zulaika Wulandary, S.H.

NIM. 2220119009

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

**PERTANGGUNGJAWABAN TIM PENJAMIN MUTU DALAM
PENETAPAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI PADA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

TESIS



Dosen Pembimbing:

- 1. Dr. Rembrandt, S.H., M.Pd.**
- 2. Dr. Misnar Syam, S.H., M. Hum.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2024

**PERTANGGUNGJAWABAN TIM PENJAMIN MUTU DALAM
PENETAPAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI PADA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Oleh: Siti Zulaika Wulandary (2220119009)

ABSTRAK

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu bentuk penggunaan APBN. Untuk menjamin hasil pengadaan barang/jasa pemerintah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan kegiatan penjaminan mutu terhadap penetapan pemenang yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran. Kegiatan penjaminan mutu itu dilakukan oleh Tim Penjamin Mutu yang dibentuk melalui Instruksi Menteri PUPR Nomor 01 Tahun 2022. Kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang merupakan tindakan hukum pemerintah menghasilkan keputusan tata usaha negara. Keputusan tersebut sering digugat oleh pihak lain yang merasa dirugikan. Keberadaan TPM sebagai organ pemerintah yang turut serta dalam proses penetapan pemenang oleh Pengguna Anggaran tidak diatur pertanggungjawabannya dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Oleh karena itu penting untuk diketahui kewenangan dari TPM untuk menentukan bentuk pertanggungjawabannya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kewenangan, teori tanggung jawab hukum dan teori kepastian hukum. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan data primer berupa wawancara sebagai pelengkap. Hasil penelitian yang pertama bahwa kewenangan TPM dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian PUPR berupa pemeriksaan kelengkapan dokumen usulan penetapan pemenang dan menyusun konsep rekomendasi penetapan pemenang yang akan dilakukan oleh PA, adalah kewenangan yang diperoleh melalui delegasi. Kewenangan TPM tersebut dikatakan sebagai delegasi karena memenuhi unsur-unsur perolehan kewenangan delegasi menurut para ahli. Namun demikian apabila merujuk pada UUAP, kewenangan yang diberikan pada TPM tidak dapat dikategorikan sebagai delegasi karena menurut UUAP delegasi hanya dapat ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden/Peraturan Daerah. Namun demikian apabila merujuk pada UUAP, kewenangan TPM juga tidak dapat dikatakan sebagai mandat karena syarat-syarat terjadinya pemberian mandat diatur dengan sangat spesifik. Kedua, oleh karena kewenangan TPM didapatkan secara delegatif maka TPM menanggung pertanggungjawaban hukum. Namun demikian, pertanggungjawaban TPM hanyalah terbatas pada pertanggungjawaban tugas kepada PA yaitu berupa tanggung jawab internal. Kewenangan penetapan pemenang yang tetap dilakukan oleh PA menjadikan PA tetap memikul beban pertanggungjawaban hukum atas keputusan yang dikeluarkannya yaitu Surat Penetapan Pemenang Penyedia oleh Pengguna Anggaran.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Kewenangan, Penetapan Pemenang, Pengguna Anggaran, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

**THE ACCOUNTABILITY OF QUALITY ASSURANCE TEAM IN
DETERMINING CONSTRUCTION SERVICE PROVIDER IN THE
GOVERNMENT PROCUREMENT AT THE MINISTRY OF PUBLIC
WORKS AND HOUSING**

Oleh: Siti Zulaika Wulandary (2220119009)

ABSTRACT

Government procurement is one form of using the State Budget. To ensure the results of government procurement, the Ministry of Public Works and Housing assigned quality assurance activity to determine the winner carried out by the Budget User. Quality assurance activity is carried out by the Quality Assurance Team, which was established on the instruction of the Minister of Public Works and Housing Number 01 of 2022. Government procurement, which is government legal action, generates state administrative decisions. This decision is often made by other parties who feel aggrieved. The existence of the Quality Assurance Team (QAT) as a government organ that participates in the process of determining the winner by Budget User is not regulated by its accountability in the process of government procurement. Therefore, the authority of QAT to determine the form of accountability is important to understand. This study was a prescriptive normative study. The theories used in this study were authority theory, legal accountability theory, and legal certainty theory. The main data source in this study was secondary data, with primary data in the form of interviews as a compliment. The first result of the study suggested that the authority of QAT in the process of government procurement in the Ministry of Public Works and Housing in the form of checking the completeness of the proposal document for determining the winner and preparing the concept of recommendation for determining winner carried out by Budget User is the authority obtained from delegation. The authority of QAT is stated as delegation because it meets the elements required to obtain delegation authority, according to experts. However, if referring to Government Administration Law, the authority given to QAT cannot be categorized as delegation because, according to Government Administration Law, delegation can only be assigned by the Government Regulation/Presidential Regulation/Regional Regulation. However, if referring to Government Administration Law, the authority of QAT also cannot be stated as a mandate because the conditions of granting a mandate are regulated very specifically. Second, because the authority of QAT is obtained delegatively, then QAT has legal accountability. However, the accountability of QAT is only limited to accountability for duties to the Budget User, which is in the form of internal accountability. The authority of assigning a winner, which is still carried out by the Budget User, gives the Budget User the burden of legal accountability towards the verdict issued, which is the Letter of Assigning the Winner of Provider by the Budget User.

Keywords: Accountability, Authority, Assigning Winner, Budget User, Government Goods/Services Procurement